



Implementasi Prinsip Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PPKN pada Siswa Kelas X di SMAN 4 Blitar

Wisnu Fataaz Dzaki¹, Dwi Retnani Srinarwati², Riki Suliana³

¹⁻³ Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

Email : wisnufataazdzaki@gmail.com¹, dwiretnani@unipasby.ac.id²

riki@unipasby.ac.id³

Abstract Indonesia, as a country whose population adheres to various religions, faces a high risk of religious intolerance. As an effort to address conflicts rooted in religious intolerance, it is necessary to foster an attitude of religious moderation based on the principles of justice, balance, and tolerance. One way to implement the principles of religious moderation is through Civics education for students. The purpose of this research is to describe the implementation of the principles of religious moderation in Civic learning for Grade X students at SMAN 4 Blitar. The method used in this research is a descriptive qualitative method. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques employed are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings show that the implementation of the principles of religious moderation in Civics learning for Grade X students at SMAN 4 Blitar is carried out throughout various learning processes. The principles of justice and balance are applied in student grouping activities as well as in the assessment stage. Meanwhile, discussion activities using the jigsaw learning method serve as the main activity in applying the principles of religious moderation in Civics learning at SMAN 4 Blitar.

Keyword: Religious Moderation, Civics Learning, Students

Abstrak. Indonesia sebagai negara yang penduduknya menganut beragam agama, memiliki resiko besar terjadinya intoleransi. Sebagai upaya untuk mengatasi konflik intoleransi berlandaskan agama, maka perlu adanya sikap moderasi beragama yang berlandaskan para prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip moderasi beragama adalah melalui pembelajaran PPKn pada siswa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi prinsip moderasi beragama dalam pembelajaran PPKn pada siswa kelas X di SMAN 4 Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang ditemukan dalam implementasi prinsip moderasi beragama dalam pembelajaran PPKn pada siswa kelas X di SMAN 4 Blitar yaitu prinsip tersebut diimplementasikan dalam berbagai proses pembelajaran. Prinsip keadilan dan keseimbangan diimplementasikan pada kegiatan pengelompokan siswa serta pada tahap penilaian. Sedangkan kegiatan diskusi pada metode pembelajaran jigsaw menjadi kegiatan utama dalam menerapkan prinsip moderasi beragama pada pembelajaran PPKn di SMAN 4 Blitar.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Pembelajaran PPKN, Siswa

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara multikultural dengan beragam budaya, bahasa, adat, dan agama. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan ataupun penistaan Agama, Indonesia mengakui enam agama sebagai agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Hak atas kebebasan beragama juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 29, yang menjamin kemerdekaan tiap warga negara dalam memilih dan menjalankan agama sesuai keyakinannya.

Namun, keberagaman tersebut tidak jarang menimbulkan konflik berlatar agama. Masalah agama menjadi sangat sensitif di Indonesia, seperti tercermin dalam kasus konflik Poso (2000), Ambon (1999), dan Tolikara (2015). Bahkan di lingkungan sekolah, sikap

intoleransi bisa muncul dalam bentuk perundungan atau diskriminasi terhadap teman yang berbeda agama. Faktor sosial-ekonomi, politik, pendidikan, ideologi, serta media menjadi penyebab berkembangnya radikalisme (Taufiq et al., 2020).

Untuk menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik, diperlukan implementasi prinsip-prinsip moderasi beragama. Moderasi beragama berfungsi mempertahankan keseimbangan di tengah keragaman dan membangun masyarakat yang inklusif, damai, serta menjunjung nilai-nilai toleransi dan saling menghormati (Fathurrahman et al., 2024). Moderasi beragama sendiri berarti sikap beragama yang tidak ekstrem, baik fanatik maupun liberal, melainkan seimbang dan toleran (Zahroh, 2022). Moderasi ini berkaitan erat dengan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa seperti religiusitas, kejujuran, toleransi, nasionalisme, cinta damai, dan tanggung jawab sosial (Widowati, 2023). Prinsip dasarnya adalah keadilan dan keseimbangan, sebagaimana dinyatakan dalam buku *Moderasi Beragama* terbitan Kementerian Agama RI tahun 2019.

Pendidikan menjadi jalan strategis untuk menerapkan nilai-nilai dari prinsip moderasi beragama sejak dini. Salah satu mata pelajaran yang relevan dalam penerapan ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik diharapkan dan diarahkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai toleransi dan hidup berdampingan secara damai dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika.

Beberapa penelitian yang mendukung hal ini, antara lain penelitian Heriyono (2024) Dengan judul *Internalisasi Prinsip Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA* menyoroti pentingnya fakta kemultikulturalan masyarakat sekitar dapat dijadikan sebagai potensi dalam menjelaskan konsepsi moderasi beragama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu mendorong peserta didik untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang mengedepankan keadilan sosial dengan menjunjung semangat Bhineka Tunggal Ika.

Selanjutnya penelitian Sunardi (2023) Berjudul *Internalisasi Kaidah Moderasi Beragama Melalui Pendidikan PKn di SMA Negeri 1 Babat Lamongan*, penelitian ini menekankan pentingnya Pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam ranah moderasi beragama melintasi proses pembelajaran. Pembelajaran dengan tema Bhinneka Tunggal Ika bertujuan memberikan pemahaman yang relevan tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang bermakna, diharapkan perkembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dapat diwujudkan

melalui pemahaman, sikap, dan tindakan nyata yang mencerminkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti telah melaksanakan penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PPKn pada Siswa Kelas X di SMAN 4 Blitar.” Dengan fokus penelitian pada prinsip moderasi beragama dalam pembelajaran PPKn pada kelas X di SMAN 4 Blitar. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak secara khusus meneliti tentang tema kebhinekaan, tetapi memiliki tentang penerapan prinsip moderasi beragama yang berkeadilan, seimbang, dan toleransi dalam proses pembelajaran PPKn.

2. KAJIAN PUSTAKA

Moderasi Beragama

Moderasi beragama berarti sikap moderat dalam beragama dan berinteraksi antaragama, tidak condong ke ekstrem kiri atau kanan, melainkan berada di posisi tengah yang adil dan seimbang (Munir dkk., 2020; Kemenag RI, 2019). Moderasi bukan berarti memoderasi ajaran agama itu sendiri, melainkan menjalankan ajaran agama dengan adil dan tidak berlebihan, sesuai nilai keseimbangan dan keadilan yang sudah terkandung dalam agama.

Menurut Kurnia (2023) moderasi beragama menekankan sikap netral dan jalan tengah dalam beragama, menghindari praktik keagamaan yang ekstrem. Buku *Moderasi Beragama* Kementerian Agama RI (2019) menegaskan bahwa prinsip utama moderasi beragama adalah keadilan dan keseimbangan, yang berarti mencari titik temu dalam perbedaan, sebagaimana ditegaskan dalam konsep al-adl dan al-qisth dalam Al-Qur'an.

Quraish Shihab (dalam Mayasari, 2023) menambahkan prinsip ketiga, yaitu toleransi, di samping keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan berarti berpihak pada kebenaran secara wajar, keseimbangan mengupayakan keselarasan antarberbagai dimensi kehidupan, dan toleransi menekankan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan tanpa menyeragamkan keyakinan itu sendiri.

Keadilan dalam moderasi beragama mencakup keseimbangan antara akal dan wahyu, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan komunitas. Sementara itu, keseimbangan menjadi landasan penting dalam mencapai keadilan, karena keadilan mustahil tercapai tanpa keseimbangan di berbagai aspek kehidupan.

Toleransi menjadi prinsip penting dalam moderasi beragama, yang bertujuan membangun sikap saling menghormati di tengah keberagaman. Sikap ini menolak fanatisme,

eksklusivisme, serta pemaksaan keyakinan, dan justru mengedepankan penerimaan terhadap pluralitas yang dijamin dalam hukum dan konstitusi negara.

Dengan demikian, moderasi beragama adalah pemikiran, sikap, dan perilaku yang menjunjung keadilan, keseimbangan, serta toleransi, sehingga dapat menghindarkan individu dari sikap ekstrem dalam beragama dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Istilah Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah hasil terjemahan dari dua istilah teknis yang berasal dari literatur asing, yakni *civic education* dan *citizenship education*. Menurut Taniredja dkk. (dalam Marlina, 2019:9) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya sistematis untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan serta keterampilan fundamental mengenai kenegaraan, dengan tujuan membentuk individu yang mampu berperan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi usaha negara untuk meningkatkan kualitas peserta didik sehingga dapat menjadi warga negara yang baik.

Proses pembelajaran PPKn Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan untuk membentuk karakter siswa menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan bertanggung jawab dengan Alur proses pembelajaran yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam merancang proses pembelajaran PPKn, guru dituntut untuk menyusun perangkat pembelajaran, seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), maupun modul ajar. Selain itu, guru juga dapat menerapkan model pembelajaran, seperti model pembelajaran induktif dan deduktif, model pembelajaran ekspositori, model pembelajaran terpadu, serta model pembelajaran *jigsaw*.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini memainkan peran penting dalam merencanakan warga yang cerdas, cakap, dan berwawasan luas. Berdasarkan rumus "*civic education*" (dalam Setiara, 2021:8) disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting bagi pengembangan budaya perkotaan, untuk pergantian peristiwa yang efektif dan pemeliharaan negara demokrasi.

Tujuan merupakan salah satu komponen esensial dalam proses pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), tujuan utamanya adalah *to make a good and smart citizen*, yang berarti membentuk warga negara yang baik dan cerdas (Putri, 2019:13). Secara umum, tujuan mata pelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam berbagai dimensi kewarganegaraan, meliputi:

- Sikap kewarganegaraan, yang mencakup keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai warga negara (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*);
- Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*);
- Keterampilan kewarganegaraan, termasuk kecakapan serta partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*civic competence and civic responsibility*).

Ruang lingkup pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meliputi elemen yang disesuaikan dengan Keputusan Kepala BSKAP Nomor 32 Tahun 2024. Dijelaskan bahwa capaian pembelajaran siswa di tingkat SMA dibagi menjadi dua yaitu fase E dan fase F. fase E merujuk pada capaian pembelajaran untuk kelas 10 SMA, sedangkan fase F untuk capaian pembelajaran kelas 11 dan 12 SMA.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, yakni meneliti fenomena dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil berupa narasi (Istiarto & Yulianto, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan penerapan prinsip moderasi beragama dalam pembelajaran PPKn pada siswa kelas X di SMAN 4 Blitar.

Sumber data penelitian dibagi menjadi data primer serta data sekunder (Hardani dkk., 2020). Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sementara data sekunder berasal dari dokumen pembelajaran PPKn di SMAN 4 Blitar. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020) yang dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai kejenuhan. Proses analisis meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peneliti telah melakukan penelitian terkait implementasi prinsip moderasi beragama dalam pembelajaran PPKn pada siswa kelas X di SMAN 4 Blitar. SMAN 4 Blitar terletak di Jalan Melati No. 49, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur. SMAN 4 Blitar didirikan pada tahun 2012. Bapak Saiful Anwar selaku guru plejarian PPKn kelas X di SMAN 4 Blitar menyatakan bahwa “Selama ini saya cenderung paling sering menggunakan metode yang jigsaw. Setelah saya cermati sekian puluh tahun, dengan metode jigsaw itu anak-anak sangat aktif, tidak ada yang duduk di tempat saja”. Hal ini sesuai dengan

hasil dari observasi pembelajaran PPKn pada kelas X-I tanggal 16 Januari 2025 dimana pembelajaran PPKn dilaksanakan menggunakan metode jigsaw.

Dalam pembelajaran PPKn, Prinsip keadilan diterapkan dengan upaya guru untuk memperlakukan siswa secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau latar belakang lainnya.

“proses pembentukan kelompok di kelas itu yang pertama saya menghitung jumlah laki-laki dan perempuan. Tentu saja saya tidak ingin nanti dalam kelompok itu perempuan itu perempuan saja, laki-laki saja. Berikutnya saya petakan kekuatan berpikir analisa memecahkan masalah dari siswa secara keseluruhan. Ada anak kategorinya itu pintar konsep, tapi dia tidak pintar menyampaikan konsep itu. Ada yang karakternya itu pintar menyampaikan, tapi sebetulnya konsepnya lemah. Kemudian ada anak yang justru sukanya itu diam saja. Saya memetakan itu dan menjadikannya pedoman untuk membuat kelompok.”.

Pendapat ini didukung oleh keterangan siswa bernama Mahatma Bara bahwa dalam pembelajaran PPKn “seandainya ada yang belum dapat kelompok, guru mau membantu mencarikan kelompok atau menyesuaikan kelompok agar adil.” Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa pembagian kelompok yang adil dapat diimplementasikan dalam pembelajaran PPKn.

Prinsip keseimbangan dalam pembelajaran PPKn yang diimplementasikan melalui pembagian kerja yang seimbang diantara anggota kelompok. Pendapat tersebut sesuai dengan pernyataan dari siswa terkait pengalaman mereka mengimplementasikan prinsip keseimbangan dalam pembelajaran PPKn. Diana menyatakan bahwa “Dalam kegiatan diskusi, saya selalu menanyakan pendapat seluruh teman tanpa membeda-bedakan.” Pengalaman terkait penerapan prinsip keseimbangan juga disampaikan oleh Naura bahwa “Ketika mendapat tugas kelompok, maka kami akan membagi tugas dengan porsi yang seimbang.”

Sedangkan prinsip toleransi sebagai prinsip terakhir dalam moderasi beragama diimplementasikan melalui kegiatan diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan, dalam pembelajaran menggunakan metode jigsaw, siswa mampu menerapkan prinsip toleransi dengan sangat baik. Siswa secara aktif berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain tanpa memerdulikan latar belakang temannya. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Mochammad Bagas bahwa “Pembelajaran PPKn mengajarkan kami untuk menghargai pendapat dari orang lain tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan budaya”. Melalui kegiatan diskusi dengan metode jigsaw, siswa secara aktif mengeluarkan pendapat dan secara langsung

menerapkan toleransi dengan cara menghormati perbedaan pendapat dan tidak ekstrim terhadap pendapat sendiri.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi prinsip moderasi beragama dalam pembelajaran PPKn pada siswa kelas X di SMAN 4 Blitar dilakukan dengan menggunakan metode *jigsaw*. Metode ini dipilih karena efektif meningkatkan keaktifan, kolaborasi, dan tanggung jawab individu siswa (Shoimin dalam Slam, 2020) Melalui metode ini, prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi dapat diterapkan secara langsung dalam proses belajar mengajar.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa cara yang digunakan dalam pembelajaran PPKn untuk mengimplementasikan prinsip moderasi beragama, seperti pengelompokan siswa, kegiatan diskusi, dan pemberian nilai.

- **Pengelompokan Siswa**

Siswa dikelompokkan secara heterogen berdasarkan latar belakang agama, budaya, dan sosial. Pengelompokan ini bertujuan untuk menciptakan interaksi yang inklusif, menumbuhkan rasa keadilan dalam kesempatan berkontribusi, keseimbangan dalam kemampuan, dan sikap saling menghargai perbedaan.

- **Kegiatan Diskusi**

Dalam diskusi kelompok, siswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan pandangan lain. Diskusi ini memperkuat sikap adil terhadap perbedaan, mengembangkan keseimbangan berpikir, serta mendorong toleransi melalui interaksi antar siswa dari beragam latar belakang (Johnson & Johnson, 2018; Srumangestu et al., 2024). Selain itu, diskusi juga membangun kepekaan sosial dan mengurangi prasangka.

- **Pemberian Nilai**

Penilaian dalam pembelajaran dilakukan secara adil, objektif, dan tanpa diskriminasi latar belakang agama, budaya, atau sosial siswa (Yunita et al., 2023). Pemberian nilai yang proporsional memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sekaligus memperkuat suasana kelas yang inklusif dan harmonis (Putri & Rohman, 2024).

Namun, dalam proses implementasi, terdapat beberapa tantangan. Beberapa siswa menunjukkan sikap intoleransi seperti mengganggu teman yang sedang berdoa. Guru perlu memberikan perhatian khusus terhadap perilaku ini dengan cara menegur langsung serta menanamkan sikap saling menghargai (Sipahutar et al., 2023).

Sebagai solusi, disarankan penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek, seperti drama dan pembuatan video reka adegan. Melalui metode ini, siswa dapat lebih memahami bentuk-bentuk intoleransi dan mencari solusi nyata untuk menghadapinya. Media interaktif seperti video juga dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap pentingnya sikap moderasi beragama di era digital (Nashir et al., 2024).

Secara keseluruhan, pembelajaran PPKn di SMAN 4 Blitar telah berupaya mengimplementasikan prinsip moderasi beragama dengan cukup baik melalui metode yang inovatif dan pendekatan pembelajaran yang inklusif, meskipun tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di SMAN 4 Blitar, implementasi prinsip moderasi beragama dalam pembelajaran PPKn tercermin melalui penerapan nilai keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Prinsip keadilan terlihat dalam pembagian kelompok dan pemberian nilai yang setara, sementara keseimbangan diterapkan dengan membentuk kelompok heterogen. Toleransi ditanamkan lewat kegiatan diskusi yang mendorong siswa untuk menghormati perbedaan dan bekerja sama. Metode jigsaw terbukti efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa dan mengajarkan nilai moderasi beragama.

Namun, tantangan tetap ada, seperti sikap intoleransi sebagian siswa, misalnya mengganggu teman yang beribadah. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih dari guru dalam membimbing siswa dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama secara mendalam. Dengan perhatian lebih dari guru, tujuan pembelajaran PPKn yang mengarah pada pembentukan karakter siswa yang adil, seimbang, dan toleran dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Anwarsani, A., Erniwati, E., Mahdalena, M., Apianson, A., Najmi, H., Suwartini, S., ... & Fadillah, H. (2023). Mengajarkan Pancasila melalui puisi berjudul “Pancasila dasar negara” karya: Misnawati. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 1(3), 44–58.
- Aulia, M., Misnawati, M., Apritha, A., Setyoningsih, R. A., Handayani, P., & Saptaniarsih, W. (2023). Pelajar Pancasila pada abad ke-21 di SMAN 1 Palangka Raya. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 134–151.
- Fathurrahman, M., Abbas, N., & Sukari. (2024). *Penguatan moderasi beragama* (Tahta Media, Ed.). Penerbit Tahta Media Group.

- Heriyono, H. (2024). Internalisasi prinsip moderasi beragama melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.59373/academicus.v3i1.49>
- Istiarto, P., & Yulianto, W. E. (2023). *Penelitian kualitatif itu mengasyikkan* (M. Kika, Ed.). Penerbit Andi.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2018). *Cooperative learning: The foundation for active learning*. <https://www.intechopen.com>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama* (1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kurnia. (2023). *Penguatan moderasi beragama dalam meningkatkan karakter peserta didik MTs DDI Lombo'na Kabupaten Majene* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare].
- Marlina, L. R. (2019). *Peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan sikap tanggung jawab pada peserta didik di SMP Negeri 5 Purwokerto semester genap tahun pelajaran 2018/2019* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto].
- Mayasari, A. (2023). *Aktualisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui literasi keagamaan* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga].
- Nashir, M. J., Apriliani, E. I., & Wardani, A. (2024). Pengembangan media pembelajaran video interaktif moderasi beragama untuk meningkatkan sikap toleransi anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(6), 1591–1602. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i6.6117>
- Putri, N. A., & Rohman, F. (2024). Evaluasi dampak program literasi Al-Qur'an terhadap penguatan karakter religius siswa sekolah menengah pertama. *Educatio*, 10, 766. <https://doi.org/10.29210/1202424549>
- Setiara, N. (2021). *Analisis pembelajaran online mata pelajaran PPKn pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 16 Kota Jambi* [Skripsi, Universitas Jambi].
- Sipahutar, E., Lumbantobing, P., Gultom, H., Sitompul, A. S., & Author, C. (2023). Strategi guru menumbuhkan sikap toleransi peserta didik beda agama di SMA Negeri 3 Tarutung. *Jurnal Manajemen Pendidikan Kristen*, 3(1), 28–48.
- Slam, Z. (2020). Implementasi pembelajaran jigsaw untuk meningkatkan kolaborasi peserta didik melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 125–135. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.11117>
- Srumangestu, N. D., Fitriana, S., & Dianingsih, R. (2024). *Meningkatkan sikap toleransi melalui bimbingan klasikal dengan metode diskusi kelompok pada peserta didik kelas XI CI SMA N 11 Semarang* [Laporan Penelitian].
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif* (S. Y. Suryandari, Ed.). Alfabeta.

- Sunardi. (2023). Internalisasi kaidah moderasi beragama melalui pendidikan PKn di SMA Negeri 1 Babat Lamongan. *EDUKASIA*, 4, 361–368. <http://jurnaledukasia.org>
- Taufiq, M., Prodi, R., Agama-Agama, S., Sunan, U., Djati, G., & Bandung, B. (2020). *Agama, kekerasan dan radikalisme*. <https://www.pps.uinsgd.ac.id/saas2>
- Widowati, D. S. (2023). Penguatan karakter modernisasi keagamaan melalui literasi keagamaan dalam pendidikan Kristiani. *Filadelfia*.
- Yunita, S., Ababil, K., Ginting, B., Yana, E. Y., & Putri, A. (2023). Mewujudkan keadilan dalam lingkungan pendidikan: Studi kasus di SMP Pahlawan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 498–504.
- Zahroh, A. (2022). Penerapan moderasi beragama melalui kurikulum pendidikan. *Bidayatuna*, 230–243.